

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemunculan berbagai organisasi internasional kemudian mendorong pada terbentuknya organisasi-organisasi yang memiliki tujuan serta keanggotaan yang lebih spesifik. Hal ini tidak lain bertujuan untuk lebih memfokuskan kepentingan serta tujuan dari dibentuknya organisasi tersebut. Salah satu organisasi internasional yang memiliki tujuan spesifik adalah *North Atlantic Treaty Organization* atau (NATO). Organisasi ini merupakan perkumpulan negara-negara dengan spesifikasi dalam bidang pertahanan dan keamanan militer.

NATO merupakan sebuah organisasi yang dibentuk untuk menciptakan keamanan bersama (*collective security*). Lebih spesifik lagi, penciptaan keamanan bersama oleh NATO ini ditujukan bagi negara-negara yang berada di kawasan Atlantik Utara. Organisasi ini dibentuk pasca Perang Dunia II sebagai respon atas meningkatnya tensi antara blok Barat dan blok Timur kala itu. NATO pertama kali dibentuk pada masa perang dingin dimana aliansi keamanan mulai dirasa penting keberadaannya oleh negara-negara yang terlibat perang pada masa pasca perang dunia II. Perjanjian Brussel yang ditandatangani oleh Inggris, Prancis, Belgia, Luxembourg dan Belanda pada tahun 1948 merupakan cikal-bakal terbentuknya NATO (NATO, 1971).

Pada tahun 1949 atas gagasan dari Amerika Serikat, lima negara yang menandatangani perjanjian Brussel menandatangani *North Atlantic Treaty* di Washington DC bersama dengan beberapa negara besar yang ingin membendung kekuasaan USSR pada masa itu yakni Portugal, Italia, Norwegia, Kanada, Denmark, Islandia, dan Amerika Serikat sendiri. Perjanjian itu menetapkan kebersamaan mereka dalam bidang keamanan, bahwa apabila ada satu negara anggota perjanjian itu diserang maka negara lainnya memiliki hak untuk membantu negara tersebut dalam menjaga pertahanan dan keamanan negaranya dalam bidang militer. Di mana negara-negara Eropa Barat serta Amerika Serikat berusaha untuk mengatasi kekuatan yang terus dilancarkan Uni Soviet. Dasar pembentukan NATO sendiri tercantum di dalam *North Atlantic Treaty* pada Artikel 5, yang mana secara ringkasnya NATO berdiri sebagai usaha stabilisasi ideologi atas ancaman-ancaman yang ada saat itu dengan menggunakan pendekatan keamanan. Di dalam pembentukannya ini, NATO menerapkan beberapa nilai dasar yang menjadi acuannya. Yakni, keutuhan aliansi, atas nama demokrasi, kebebasan individu, dan aturan hukum.

NATO sebagai organisasi internasional memiliki pengaruh yang besar bukan hanya bagi negara-negara anggotanya, namun juga dalam dunia internasional. Dalam prakteknya saat ini, NATO sangat dipengaruhi oleh dominasi Amerika Serikat, seolah NATO merupakan alat untuk mencapai kepentingan AS, hal ini merupakan salah satu dinamika internal NATO yang menjadi salah satu kendala dalam menyelesaikan tugasnya.

Dalam hal pendanaan, NATO menganggarkannya dari iuran anggota yang dibayar ke NATO. Yang mana iuran ini telah diatur berdasarkan aturan pembagian biaya atau cost-sharing. Dari iuran ini kemudian NATO mengalokasikan anggarannya ke dalam tiga pos alokasi. Satu alokasi untuk sipil, sedangkan dua alokasi sisa untuk militer. Alokasi untuk militer ini lebih besar sebab pada dasarnya NATO lebih banyak bergerak di bidang keamanan yang notabene memerlukan kegiatan serta fasilitas kemiliteran yang mumpuni.

Dari 28 anggota NATO, Amerika Serikat merupakan penyumbang terbesar dalam pendanaan organisasi ini. Amerika Serikat memang dikenal merupakan negara yang sangat royal dalam pengalokasian dana militer. Dalam kasus NATO, peran Amerika Serikat dalam pendanaan organisasi ini terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 1995, 56% pendanaan NATO ditanggung oleh Amerika Serikat. Persentase ini kemudian meningkat drastis pada tahun 2013 dimana Amerika Serikat kemudian bersedia menanggung 73% beban anggaran NATO (NATO, 2013).

Kesediaan Amerika Serikat untuk menanggung 73% beban anggaran NATO ini menjadi angin segar bagi NATO mengingat krisis finansial yang sedang melanda Eropa dimana sebagian besar negara anggota NATO yang berada di Eropa juga sedang merasakan krisis finansial yang terjadi. Imbas dari krisis finansial yang terjadi ini kemudian memaksa negara-negara Eropa untuk mengeluarkan kebijakan baru dalam upaya penyelamatan ekonomi negaranya. Salah satu kebijakan yang diambil oleh negara-negara Eropa ini adalah pemangkasan anggaran militer.

Pemangkasan anggaran militer negara-negara Eropa ini tentunya berdampak negatif pada NATO. Pengurangan anggaran militer negara anggota NATO sama artinya dengan berkurangnya biaya operasional NATO. Sebagai sebuah organisasi keamanan tentunya NATO membutuhkan biaya yang sangat besar untuk membiayai setiap operasinya, pengadaan dan perawatan alat tempur, serta operasional personel militer yang bertugas, dan juga untuk keperluan operasional NATO lainnya.

Kebijakan perluasan wilayah jangkauan operasi NATO ke arah timur merupakan salah satu penyebab dari membengkaknya anggaran belanja militer NATO. Sejak tragedi 11 September, Amerika Serikat telah menggandeng negara-negara sekutunya di NATO untuk ikut terlibat dalam perang melawan gerakan-gerakan Islam di Timur Tengah yang kemudian oleh Amerika Serikat disebut sebagai teroris. Keterlibatan NATO dalam operasi militer Amerika ini dikuatkan dengan pidato Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO R. Nicholas Burns pada pertemuan NATO di Istanbul di tahun 2004. Nicholas Burns mengatakan bahwa *“Mandat NATO masih merupakan tindakan mempertahankan Eropa dan Amerika Utara. Tapi kita tidak percaya bahwa kita mampu melakukan itu dengan hanya duduk diam di Eropa Barat, atau Eropa Tengah, atau Amerika Utara. Kita harus mengerahkan perhatian konseptual kita dan kekuatan militer kita ke arah timur dan selatan. Masa depan itu ada pada Timur Tengah Raya”* (NATO, 2004). Pidato ini sekaligus mendorong NATO untuk mendukung kebijakan-kebijakan militer Amerika Serikat karena sebagai negara dengan kekuatan militer terbesar dan penyumbang dana terbesar bagi NATO, Amerika Serikat memiliki

kemampuan yang besar untuk mempengaruhi kebijakan NATO. Dapat dikatakan bahwa setiap reaksi dari Amerika Serikat juga merupakan reaksi dari NATO.

Amerika Serikat dapat dikatakan menaruh perhatian yang sangat besar terhadap keberlangsungan NATO. Selain bersedia menanggung beban anggaran NATO sebesar 73%, Amerika Serikat juga sangat giat untuk mencari dana talangan bagi operasi-operasi yang dilakukan NATO kepada negara-negara mitra internasional NATO diluar kawasan Eropa seperti Australia, Jepang, dan beberapa negara besar lainnya. Pada tahun 2007, Amerika Serikat secara tegas meminta kepada seluruh anggota NATO untuk menambah pendanaan bagi pasukan NATO di Afganistan dan alasan jika hal itu tidak dilakukan maka keamanan Eropa dan Amerika akan sangat terancam. Selain itu pada tahun 2012 dimana alokasi anggaran bagi pasukan NATO yang berada di Afganistan dirasa masih kurang, Amerika Serikat bergerak cepat untuk mencari dana talangan senilai USD 1 miliar dari mitra-mitra internasionalnya diluar dana yang dikeluarkan pemerintah Amerika Serikat untuk membiayai pasukan NATO di Afganistan senilai USD 3 miliar per-tahunnya. Dan yang terbaru adalah pernyataan dari Menteri Pertahanan Amerika Serikat Chuck Hagel yang mendesak negara-negara sekutu yang tergabung didalam NATO untuk meningkatkan anggaran pertahanannya sebagai respon atas krisis Ukraina.

Yang menjadi masalah adalah bahwa apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan menanggung 73% beban anggaran NATO sangat tidak relevan dengan kondisi ekonominya yang sedang mengalami krisis. Perekonomian Amerika Serikat dapat dikatakan hampir sampai pada “kiamat”. Kali ini bukan

soal apakah kebijakan moneter mencetak uang untuk membeli kembali obligasi Pemerintah AS (*quantitative easing*) akan dikurangi jumlahnya (*tapering off*), melainkan soal penghentian sebagian layanan publik (*shut down*) karena Pemerintah AS tidak diizinkan Kongres menambah hutang. Hutang Pemerintah AS yang dipakai untuk menutup defisit anggaran sudah mencapai batas yang diizinkan konstitusi (*debt ceiling*), yang jumlahnya sudah melebihi produk domestik bruto sekitar 16 triliun dollar AS pada oktober 2013 (Kompas.com, 2013). Krisis ini juga yang kemudian memaksa pemerintah Amerika Serikat untuk memangkas anggaran belanja militernya.

Krisis ini secara tidak langsung memiliki hubungan yang cukup kuat dengan krisis yang pernah terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2008 saat terjadinya kredit yang macet disektor properti (*subprime mortgage*). Di Amerika Serikat sendiri, sejak tahun 1925 telah memiliki undang-undang tentang properti (*Mortgage*). Undang-undang ini berkaitan dengan sektor properti, termasuk kredit pemilikan rumah. Semua warga Amerika Serikat asalkan memenuhi syarat tertentu dapat memperoleh kemudahan dalam kredit kepemilikan properti, seperti kredit kepemilikan rumah. Kemudahan dalam pemberian kredit terjadi ketika harga properti di AS sedang naik. Kegairahan dalam pasar properti membuat spekulasi di sektor ini meningkat pesat. Para penyedia kredit properti memberikan suku bunga tetap selama tiga tahun. Hal ini akhirnya mendorong orang-orang membeli rumah dan berharap bisa menjual dalam tiga tahun sebelum suku bunga disesuaikan. Permasalahannya, banyak lembaga keuangan pemberi kredit properti di Amerika Serikat menyalurkan kredit kepada penduduk yang sebenarnya tidak

layak memperoleh pembiayaan. Mereka adalah orang dengan latar belakang *non-income, non-job, non-activity* yang tidak mempunyai kekuatan ekonomi untuk menyelesaikan tanggungan kredit yang mereka pinjam.

Selanjutnya, kredit yang macet di sektor properti ini memberi efek domino pada ambruknya lembaga-lembaga keuangan besar di Amerika Serikat. Pasalnya, lembaga pembiayaan sektor properti pada umumnya meminjam dana jangka pendek dari pihak lain, termasuk lembaga keuangan. Jaminan yang diberikan perusahaan pembiayaan kredit properti adalah surat utang, mirip *subprime mortgage securities*, yang dijual kepada lembaga-lembaga investasi dan investor di berbagai negara. Padahal, surat utang itu ditopang oleh jaminan debitor yang kemampuan membayar KPR-nya rendah. Dengan begitu banyaknya tunggakan kredit di bidang properti, perusahaan pembiayaan tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada lembaga-lembaga keuangan, baik bank investasi maupun asset management. Hal ini mempengaruhi likuiditas pasar modal maupun sistem perbankan. Setelah itu, terjadi pengeringan likuiditas lembaga-lembaga keuangan akibat tidak memiliki dana aktif untuk membayar kewajiban yang ada. Ketidakmampuan pembayaran kewajiban tersebut membuat lembaga keuangan lain yang memberikan pinjaman juga terancam bangkrut. Kondisi yang dihadapi lembaga-lembaga keuangan besar di Amerika Serikat juga mempengaruhi likuiditas lembaga keuangan lain, yang berasal dari Amerika Serikat maupun di luar Amerika Serikat, terutama lembaga yang menginvestasikan uangnya melalui instrumen lembaga keuangan besar di Amerika Serikat.

Selain itu, sebenarnya masalah dan isu keamanan sudah bukan menjadi isu utama lagi dalam dunia internasional saat ini. Di era globalisasi sekarang, isu ekonomi justru menjadi isu utama yang selalu diperbincangkan di dunia internasional. Negara-negara di dunia berlomba-lomba untuk memperkuat perekonomiannya dan kemudian berusaha mencari mitra kerjasama internasional dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan politik. Dapat dilihat dari makin banyaknya organisasi-organisasi internasional yang bergerak dibidang kerjasama perekonomian, perdagangan, dan politik seperti WTO, APEC, dan lainnya. Jika dibandingkan dengan organisasi militer, maka hanya NATO yang menjadi satu-satunya organisasi militer lintas negara dan masih tetap menunjukkan eksistensinya. Secara tidak langsung, fakta ini telah menjelaskan bahwa sebagian besar negara-negara di dunia lebih tertarik dengan fenomena kerjasama internasional non-militer dan isu keamanan bukan lagi menjadi isu yang populer di dunia internasional.

Bahkan jika Amerika Serikat tetap menganggap bahwa isu keamanan sebagai isu utama di dunia internasional terkait dengan jaminan keamanan dan menjaga kedaulatan negara dari ancaman militer negara lain, maka sebenarnya Amerika Serikat bahkan tidak membutuhkan NATO untuk mendukung keamanan negaranya. Dari segi anggaran militer serta sistem persenjataan Amerika Serikat memiliki kemampuan yang jauh lebih besar dari 27 negara anggota NATO lainnya untuk melindungi dirinya sendiri, bahkan untuk menyerang negara lain. Amerika Serikat memiliki anggaran militer senilai US\$756.4 miliar, dimana

angka ini jauh lebih besar dari total anggaran militer yang dimiliki oleh 27 anggota NATO lainnya.

Untuk sistem persenjataan dan alat tempur, Amerika Serikat memiliki 4334 buah pesawat tempur, 5741 helikopter, 71 kapal selam, 11 kapal induk, 52 destroyer, 22 kapal frigat, 41.422 rudal, dan tank sejumlah 7620 buah (theGlobal Review, 2012). Jumlah ini jauh lebih besar dari kemampuan yang dimiliki oleh pasukan militer negara-negara NATO lainnya.

Kekuatan militer Amerika Serikat yang besar ini kemudian secara tidak langsung telah memunculkan pandangan bahwa sebenarnya Amerika Serikat tidak perlu bersusah-payah untuk mendanai 73% biaya operasional NATO karena jika hanya untuk melindungi kedaulatan negaranya, Amerika Serikat sangat mampu untuk melakukannya sendiri tanpa bantuan negara-negara anggota NATO lainnya.

Dilihat dari masalah-masalah dan pertentangan yang ada mengenai besaran anggaran NATO yang ditanggung Amerika Serikat, maka terdapat indikasi-indikasi baru yang kemudian muncul bahwa motif politik, ekonomi, dan sosial-budaya telah menjadi bagian dari kepentingan yang dibawa oleh Amerika Serikat kedalam NATO untuk kepentingan nasionalnya sendiri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka untuk memudahkan pemecahan masalah dan sebagai pedoman dalam pembahasan lebih lanjut, dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

Mengapa Amerika Serikat Berkepentingan untuk mempertahankan NATO?

C. Kerangka Pemikiran

Dominasi realisme dalam HI sepanjang paruh kedua abad keduapuluh, khususnya di Amerika Serikat. Realisme sendiri naik ke posisi keunggulan akademik di 1940 dan 1950an yang secara efektif mengkritik idealisme liberal masa antarperang. Argumen utama realisme klasik adalah pandangan pesimis atas sifat manusia, keyakinan bahwa hubungan internasional pada dasarnya konfliktual dan bahwa konflik internasional pada akhirnya diselesaikan melalui perang, menjunjung tinggi nilai-nilai keamanan nasional dan kelangsungan hidup negara, skeptisisme dasar bahwa terdapat kemajuan dalam politik internasional seperti yang terjadi dalam kehidupan politik domestik.

Sumbangsih dari realisme klasik adalah memberikan pengetahuan mengenai peran utama *power* dalam semua jenis dan batasan atas *power* itu sendiri sehingga menimbulkan *self-defeating*.

- **Konsep Kepentingan Nasional**

Dalam pandangan H.J. Morgenthau, Kepentingan Nasional (*National Interest*) adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa/negara atau sehubungan dengan hal yang dicita-citakan. Dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap dan sama diantara semua negara/bangsa adalah kedaulatan, keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayah) dan kesejahteraan.

Kepentingan nasional merupakan kemampuan minimum negara untuk melindungi, dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain. Dari tinjauan ini para pemimpin negara menurunkan kebijakan spesifik terhadap negara lain yang sifatnya kerjasama atau konflik. Kepentingan nasional sama dengan usaha negara untuk mengejar power, dimana power adalah segala sesuatu yang bisa mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain.

Konsep Kepentingan Nasional yang didefinisikan dalam istilah "power" menurut Morgenthau berada diantara nalar, akal atau "reason" yang berusaha untuk memahami politik internasional dengan fakta-fakta yang harus dimengerti dan dipahami. Dengan kata lain, power merupakan instrumen penting untuk mencapai kepentingan nasional.

Morgenthau berpendapat bahwa sebuah strategi diplomasi harus berdasarkan pada kepentingan nasional. Kepentingan nasional tersebut digunakan untuk mengejar "power" yang bisa digunakan untuk membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain. Menurut Morgenthau, dengan memiliki power maka suatu negara dapat mengadili negara lain seperti mengadili negara sendiri dan kemudian dapat meningkatkan kepentingan negara yang memiliki power.

Kepentingan nasional adalah politik luar negeri sebagai strategi atau bagian yang terencana dari tindakan yang dihasilkan oleh pembuat keputusan suatu negara di dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional yang tujuannya mencapai kepentingan nasional (Plano & Olton, 1980:127).

Kepentingan nasional menurut Jack C. Plano dan Roy Olton merupakan tujuan pokok yang paling penting yang menjadi pedoman para pembuat keputusan di suatu negara dalam membuat kebijakan politik. Negara akan mengedepankan kepentingan utamanya termasuk di dalamnya hak untuk mempertahankan diri, kemerdekaan integritas wilayah, keamanan, dan kesejahteraan ekonomi. Usaha-usaha untuk mencapai kepentingan nasional kemudian dituangkan kedalam bentuk kebijakan luar negeri negara tersebut.

Amerika Serikat yang merupakan negara yang memiliki “*power*” yang sangat besar dalam dunia internasional. Dengan “*power*” yang dimilikinya tersebut, maka Amerika Serikat dapat dengan mudah untuk menggunakan pengaruhnya untuk mencapai kepentingan nasional negaranya di dalam politik internasional. Dengan power itu jugalah Amerika Serikat dapat menancapkan kebijakan luar negerinya ke negara lain dengan mudah sehingga kepentingannya dapat tercapai.

Keharusan atas pemenuhan kepentingan nasional Amerika Serikat sendiri tertuang dalam pembukaan konstitusi Amerika Serikat, yang berbunyi “*Kami rakyat Amerika Serikat dengan maksud membentuk sebuah perserikatan yang lebih sempurna, menegakkan keadilan, menjamin kedamaian domestic, mengadakan pertahanan bersama, meningkatkan kesejahteraan umum, dan menjaga anugerah kebebasan bagi diri dan para penerus kami*”.

Dalam kaitannya dengan kepentingan Amerika Serikat dalam NATO, dapat dilihat bahwa Amerika Serikat memiliki kepentingan yang besar terhadap negara-negara di Eropa. Eropa dapat dikatakan sebagai salah satu penopang utama

hegemoni Amerika Serikat di berbagai penjuru dunia. Kepentingan ekonomi juga merupakan salah satu faktor yang membuat Amerika Serikat memandang Eropa sebagai aset berharga, dimana Eropa merupakan salah satu wilayah yang memiliki tingkat kemampuan ekonomi yang besar. Dapat dikatakan jika Amerika Serikat kehilangan Eropa, maka sama artinya dengan Amerika Serikat kehilangan sebagian pengaruhnya di dunia.

Wilayah Eropa Timur juga memiliki cadangan minyak yang begitu besar. Amerika Serikat sebagai salah satu negara industri besar di dunia jelas sangat berketergantungan akan ketersediaan minyak sebagai salah satu pendukung kelangsungan industri dalam negerinya. Oleh sebab itu maka Amerika Serikat sangat berkepentingan untuk menjaga aksesnya ke wilayah-wilayah yang memiliki cadangan minyak besar di Eropa Timur.

NATO sendiri memiliki ikatan yang kuat dengan Uni Eropa, dimana negara-negara Uni Eropa masih memandang NATO sebagai sebuah organisasi keamanan yang mampu menjaga mereka dari ancaman-ancaman yang ada. NATO juga menjadi salah satu alasan mengapa Inggris akhirnya mau bergabung dengan Uni Eropa.

- **Konsep Aliansi**

Aliansi menurut Jack C. Plano dan Roy Olton diartikan sebagai bentuk perjanjian untuk saling mendukung secara militer jika salah satu negara penandatangan perjanjian diserang atau mendapat ancaman dari negara lain. Selain itu aliansi juga ditujukan untuk memajukan kepentingan bersama diantara negara anggota. Aliansi dapat dikendalikan untuk mencegah atau memenangkan

sebuah perang. Sistem keseimbangan kekuatan cenderung mendorong pakta militer untuk mengimbangi perubahan dalam keseimbangan kekuatan (Plano & Olton,1980:137). Aliansi militer biasanya dibangun dengan landasan kesamaan visi dan tujuan. Dalam perkembangannya, sebuah aliansi militer tidak hanya fokus pada tujuannya sebagai sebuah pakta militer tapi mulai cenderung melebarkan jangkauan keranah politik, ekonomi, dan Sosial.

Menurut H.J Morgenthau menyatakan bahwa Balance of Power merupakan manifestasi dari konsep power. Asumsi dasarnya adalah bahwa perang bisa dicegah jika kekuatan setiap aktor berimbang (Morgenthau,1973:173).

NATO merupakan salah satu contoh aliansi militer yang ada. Salah satu tujuan dibentuknya NATO adalah untuk melindungi kemerdekaan dan keamanan negara anggotanya, mencegah dan mengatasi krisis internasional, serta membantu PBB dalam menyebarkan nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan hukum Internasional (Griffith, Martin & O'Callaghan, 2002:219).

Dalam kaitannya dengan kepentingan Amerika Serikat didalam NATO dapat dilihat bahwa NATO juga memiliki tujuan yang sama dengan Amerika Serikat dalam masalah geopolitik di wilayah Eropa Timur dimana Rusia tengah bangkit dan berusaha untuk membentuk sebuah kekuatan baru di wilayah Eropa.

Dengan kekuatan aliansi yang besar maka semakin besar pula dukungan kepada Amerika Serikat dalam setiap kebijakan luar negerinya. Amerika Serikat membutuhkan NATO sebagai benteng dari setiap kritikan dan protes yang mungkin datang dari dunia internasional terkait dengan kebijakan-kebijakan luar negerinya. Benteng yang dimaksudkan adalah NATO digunakan oleh Amerika

Serikat untuk melakukan intervensi dan operasi militer yang mengatasnamakan NATO, dimana sebenarnya tindakan itu lebih bertujuan kepada pemenuhan kepentingan dari Amerika Serikat itu sendiri.

D. Hipotesis

Mempertahankan NATO merupakan langkah yang dianggap strategis oleh Amerika Serikat untuk mencegah dan menghilangkan ancaman bagi kepentingan dan pengaruhnya di wilayah Eropa.

Berdasarkan pada Latar Belakang masalah dan Rumusan masalah yang ada, maka dapat ditarik sebuah hipotesa mengenai mengapa Amerika Serikat berkepentingan mempertahankan NATO, yaitu :

“Sebagai bentuk antisipasi Amerika Serikat untuk membendung agresifitas Rusia terkait kekhawatirannya akan kebangkitan militer Rusia.”

E. Jangkauan Penulisan

Untuk mempermudah dalam pengumpulan data dan penulisan skripsi ini, maka penulis harus memberi batasan pada jangkauan penulisan dalam materi yang disampaikan agar pembahasan tidak melebar jauh dan sesuai dengan tujuan penulisan skripsi ini.

Adapun jangkauan penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

Skripsi ini akan membahas tentang tujuan dibalik kepentingan Amerika Serikat yang menggunakan NATO sebagai media untuk membantu Amerika Serikat

dalam membendung kekuatan militer Rusia yang terus tumbuh seiring dengan meningkatnya perekonomian negara tersebut di wilayah Eropa secara umum dan Eropa Timur secara khusus sejak berakhirnya perang dingin sampai tahun 2014.

Alasan penulis memilih untuk memfokuskan pembahasan pada kurun waktu dari berakhirnya perang dingin sampai tahun 2014 karena setelah kejatuhan Uni Soviet pada awal 1990-an, Rusia perlahan-lahan mulai bangkit untuk membenahi sektor ekonomi dan militernya hingga menjadi sebuah negara dengan power yang sangat diperhitungkan oleh Amerika Serikat dan Eropa Barat.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sekunder. Dimana penulis melakukan pengumpulan data melalui buku, jurnal, surat kabar, artikel internet, official website, dan sumber-sumber lainnya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari :

BAB I membahas tentang Latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, jangkauan penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II membahas tentang dinamika keterlibatan AS di Eropa

BAB III membahas tentang konsistensi AS dalam mempertahankan NATO

BAB IV membahas tentang kebangkitan Rusia sebagai sebuah ancaman bagi AS

BAB V merupakan kesimpulan dan penutup.

